

REVIEW ARTIKEL JURNAL

Neutrality In Public Libraries: How Are We Defining One Of Our Core Values?



Disusun oleh:

Isnaeni Nur Fatimah

071911633090

MATA KULIAH ETIKA PELAYANAN

DEPARTEMEN ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

REVIEW ARTIKEL JURNAL

Judul : Neutrality in Public Libraries: How Are We Defining One of Our Core Values?

Tahun : 2020

Penulis: Dani Scott dan Laura Saunders

Scott, Dani., and Saunders, Laura. (2020). Neutrality in public libraries: How Are We Defining One of Our Core Values?. *Journal of Librarianship and Information Science*, 1-14. doi: 10.1177/0961000620935501. Reviewed by Isnaeni Nur Fatimah.

1. Latar Belakang

Di dalam artikel ini, Dani Scott dan Laura Saunders menganalisis bagaimana perpustakaan publik mendefinisikan “*neutrality*” dan bagaimana “*neutrality*” tersebut mempengaruhi pekerjaan mereka di perpustakaan. Penulis beranggapan dalam beberapa tahun terakhir, para profesional perpustakaan telah memperdebatkan ide tentang netralitas (*neutrality*) dan apakah hal tersebut mungkin untuk dicapai serta apakah hal tersebut diinginkan oleh pustakawan. Literatur Ilmu Informasi dan Perpustakaan banyak membahas tentang peran netralitas di dalam profesi, baik dalam artikel, konferensi nasional/regional, maupun di sosial media termasuk *Twitter’s #critlib* dan blog seperti *In the Library with the Lead Pipe*. Faktanya, American Library Association (ALA) tidak memasukan istilah “netralitas” di standar nilai kode etik dan tidak ada panduan langsung tentang peran netralitas dalam profesi. Sebaliknya, peran netralitas diperdebatkan di dalam literatur Ilmu Informasi dan Perpustakaan tanpa definisi yang jelas. Faktanya, istilah netralitas digunakan untuk segala sesuatu mulai dari tidak memihak pada masalah kontroversial hingga penyediaan informasi yang objektif dan posisi untuk membela kebebasan intelektual dan kebebasan berbicara. Masing-masing definisi dari aspek netralitas ini memiliki pengaruh ada bagaimana profesional informasi mengimplementasikan layananannya pada *user*. Pentingnya netralitas di lapangan dibuktikan dengan fakta bahwa perdebatan tentang netralitas sering kali menjadikan konsep tersebut sebagai nilai profesional yang fundamental meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam kode etik profesi, tetapi secara ideal menjadi peran pustakawan pada masyarakat, khususnya tanggung jawab sosial yang secara eksplisit disebutkan dalam American Library Association tahun 2019. Karena netralitas tidak disebutkan di dalam kode etik profesi pustakawan, banyak yang bertanya bagaimana

netralitas dipandang sebagai *core value* atau nilai inti oleh beberapa orang. Sebagaimana ditelaah lebih rinci dalam literatur *review*, konsep netralitas cenderung disamakan dengan kebebasan intelektual, yang mana sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, merupakan nilai inti pustakawan (American Library Association, 2019).

Pada penelitian sebelumnya, Oltmann (2016) mengemukakan bahwa tradisi perpustakaan dalam menyediakan akses informasi tanpa batas di Amerika berakar pada cita-cita demokrasi berupa kebebasan intelektual dan kebebasan berbicara. Menurut cita-cita demokrasi, akses informasi diperlukan agar demokrasi berfungsi karena warga negara harus dapat mengakses dan menggunakan informasi untuk menggunakan haknya. Selanjutnya, teori otonomi individu menyatakan bahwa kebebasan berbicara diberdayakan dan kemampuan untuk menggunakan kebebasan berbicara memungkinkan untuk pemenuhan diri (*self-fulfillment*). Jadi, perpustakaan berperan untuk memfasilitasi hak masyarakat untuk berdemokrasi dan pemenuhan diri. Penulis beragumen bahwa kebebasan intelektual sebagai salah satu nilai inti dari kepustakwanan dan juga demokrasi tidak sama dengan konsep netralitas. Dalam mendukung kebebasan intelektual, pustakawan, tidak memihak karena mereka tidak bertindak sebagai penjaga gerbang dengan memutuskan informasi apa yang harus dapat diakses atau memberikan penilaian tentang jenis informasi apa yang dapat diakses orang-orang. Namun, pustakawan memihak dengan memilih untuk mendukung kebebasan intelektual. Penulis beragumen bahwa dalam pilihan tersebut pustakawan memiliki konsekuensi yang mungkin tidak netral. Serta, penulis meragukan apakah pustakawan benar-benar tidak memihak pada konten dan akses informasi. Pustakawan tentu saja membuat keputusan tentang sumber daya apa yang akan ditambahkan atau tidak ditambahkan ke koleksi, pajangan, buku-buku dan pilihan tersebut dapat menyiratkan penilaian konten. Serta, ketika pustakawan membantu orang menemukan jawaban atas pertanyaan dan mengevaluasi informasi yang mereka temukan, mereka membuat penilaian tentang otoritas, akurasi, relevansi, dan kredibilitas. Dalam kasus seperti itu, pustakawan mungkin berusaha untuk bersikap objektif dalam pemilihan mereka, tetapi penulis di dalam argumennya meragukan kesamaan hal itu dengan netralitas. Penulis juga beranggapan bahwa perpustakaan umum sebagai forum publik memiliki kewajiban dan tanggung jawab terkait kebebasan berbicara dan berkumpul secara bebas untuk semua kalangan yang mana sejalan dengan konsep netralitas.

2. Tinjauan Literatur

Dalam kamus Bahasa Inggris Oxford (2019) “netralitas” diartikan sebagai “keadaan atau kondisi tidak berada di pihak manapun; tidak adanya pandangan, perasaan, atau ekspresi yang diputuskan.” Tetapi, pustakawan cenderung melihat netralitas sebagai nilai-nilai inti dalam profesi. Terlebih lagi, ALA tidak menggunakan kata “netralitas” dalam standar kode etiknya. Tetapi ada bahasa yang mungkin dianggap memiliki arti yang setara dengan netralitas, misalnya, dalam “Kode Etik Pustakawan” menegaskan bahwa pustakawan harus memberikan “tanggapan yang tidak bias” dan “membedakan antara keyakinan pribadi dan tugas profesional” (ALA, 2008). Sama halnya dengan “*Library Bill of Rights*” tidak menyebutkan netralitas secara langsung, tetapi mendeklarasikan posisi yang dianggap “netral” bahwa pustakawan harus menyediakan koleksi yang mewakili “semua sudut pandang dalam sejarah masa kini dan lalu” dan membuat ruang diskusi (*meeting-room*) yang tersedia “atas dasar yang adil, terlepas dari keyakinan/afiliasi individu atau grup yang meminta penggunaannya.” (ALA, 2019). Kode etik tersebut menegaskan bahwa pustakawan tidak boleh memihak pada pihak manapun. Dalam beberapa kasus, profesional Ilmu Informasi dan Perpustakaan menyamakan cita-cita demokrasi tentang kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan kebebasan intelektual sebagaimana diatur dalam Konstitusi AS atau Deklarasi Universal HAM PBB (1988), sebagai posisi netral.

Hauptman (1976) dalam penelitiannya, mendekati 13 pustakawan yang berbeda dan meminta bantuan untuk mencari informasi untuk membuat bom, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pustakawan yang keberatan dengan pertanyaannya atau menolak membantunya menemukan informasi atas dasar etika. Percobaan serupa beberapa tahun kemudian yang dilakukan oleh Dowd (1989) membuahkan hasil yang serupa. Menariknya, reaksi para peneliti sangat berbeda terhadap temuan mereka. Meskipun dia tidak menggunakan kata “netralitas” dalam menjelaskan tanggapannya, Hauptman (1976:626) menyimpulkan bahwa pustakawan ini “tampaknya mengabaikan tanggung jawab kepada masyarakat demi tanggung jawab atas peran mereka sebagai pustakawan sebagai penyebar informasi”, dan memang seorang pustakawan bersikeras bahwa sifat permintaan itu “tidak relevan” dan jika ia menolak untuk membantu, itu sama saja dengan “diskriminasi”. Hauptman (1976: 627) merespon temuannya dengan memberi kesan bahwa pustakawan “kebingungan *censorship* dengan tanggung jawab etis,” dan kemudian menggambarkan pendekatan pustakawan sebagai “kekosongan etika” (Hauptman, 1996). Dowd (1989), di sisi lain, memuji akses bebas informasi sebagai hak masyarakat dan kebutuhan profesional. Studi yang lebih baru

cenderung berfokus pada kebebasan intelektual dan penyaringan dalam membangun koleksi. Misalnya, Oltmann (2016a, 2016c, 2019) pandangan pustakawan publik tentang kebebasan intelektual membantu dalam memahami interaksi etika profesional dan pekerjaan perpustakaan. Oltmann (2019: 9) menemukan bahwa "mereka yang memiliki gelar MLS (Magister Ilmu Informasi dan Perpustakaan) lebih cenderung sejalan dengan sikap yang diambil oleh ALA".

3. Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan responden pekerja Perpustakaan Publik di Amerika Serikat sejumlah 540 pekerja dari 40 negara bagian dengan cara membagikan survei. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pustakawan publik di Amerika Serikat memahami netralitas dan mengkaji bagaimana pertanyaan netralitas mempengaruhi praktik kerja mereka. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan penelitian berikut:

- Bagaimana pustakawan publik mendefinisikan netralitas? Apakah ada definisi netralitas yang secara umum dipegang?
- Kapan dan sejauh mana pustakawan publik berpikir tentang netralitas ketika terlibat dalam praktik sehari-hari seperti mengembangkan koleksi dan membuat pajangan?
- Mengingat skenario tertentu, sejauh mana pustakawan publik melihat setiap skenario sebagai ilustrasi netralitas, dan sejauh mana mereka setuju bahwa pustakawan harus terlibat dalam perilaku yang digambarkan dalam skenario?

Survei penelitian ini memiliki 9 pertanyaan. Pertanyaan pertama meminta responden untuk memilih pernyataan yang paling tepat untuk mendefinisikan netralitas dari pilihan berikut: tidak memihak pada suatu masalah; bersikap objektif dalam pemberian informasi; kurang bias; dan tidak mengungkapkan pendapat. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memeriksa berbagai kemungkinan mana yang paling dikaitkan oleh responden survei dengan istilah "netralitas". Selanjutnya, para responden berikan serangkaian skenario singkat. Rangkaian pertanyaan pertama meminta responden untuk menunjukkan apakah mereka percaya skenario tersebut adalah contoh perilaku "netral", terlepas dari apakah mereka setuju dengan perilaku yang digambarkan. Tujuannya adalah untuk menyelidiki tindakan atau perilaku apa yang disamakan pustakawan dengan netralitas. Rangkaian pertanyaan terakhir

menyajikan rangkaian skenario yang sama, tetapi kali ini responden diminta untuk menunjukkan apakah mereka setuju dengan perilaku dan tindakan yang digambarkan.

4. Temuan

Dalam hasil survei yang terkumpul, responden yang tersebar cukup merata persebaran jabatan dan fungsinya. Presentasi paling besar, sejumlah 26% merupakan direktur perpustakaan diikuti pustakawanan layanan publik sebesar 17%. Mayoritas responden, 72% memiliki gelar Magister Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Survei disebarkan sampai 40 negara bagian Amerika Serikat tetapi sebagian besar pekerja perpustakaan (224) berasal dari Massachusetts, diikuti oleh 56 dari Maine, 31 dari Missouri, 21 dari Rhode Island, dan 19 dari Florida. Sebagian besar peserta bekerja di lingkungan perpustakaan "pinggiran kota", sebesar 47%, sementara 30% mengatakan bahwa mereka bekerja di lingkungan pedesaan, dan 23% bekerja di lingkungan perpustakaan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pustakawan publik mendefinisikan "netralitas" secara eksplisit dan dilihat melalui tindakan mereka, dan untuk mengeksplorasi sikap mereka terhadap netralitas sebagai nilai dalam profesinya.

- Temuan pertama, para responden jelas tidak setuju tentang apakah pustakawan harus, atau bahkan bisa, netral. Di satu sisi, lebih dari dua pertiga responden "setuju" atau "sangat setuju" bahwa netralitas adalah nilai penting di lapangan dan bahwa pustakawan harus tetap netral dalam memberikan layanan. Namun, hampir sepertiga dari responden tidak setuju bahwa netralitas adalah nilai penting yang harus dicoba dicapai oleh pustakawan. Bahkan beberapa dari responden menggambarkan netralitas sebagai "mitos" dan "mendukung status quo." Seorang responden menyatakan bahwa: "Netralitas perpustakaan adalah kesalahan; pilihan untuk menawarkan informasi dan layanan kepada semua sudah merupakan sikap politik dan filosofis, dan karena konservatisme bergantung pada penindasan informasi". Banyak dari tanggapan survei terbuka ini mengilustrasikan ambiguitas istilah dan kebingungan atas definisi netralitas. Definisi yang berbeda-beda ini tampaknya menegaskan kurangnya ketepatan penggunaan istilah "netralitas".
- Kurangnya konsistensi terlihat ketika definisi pilihan tetap dari netralitas dibandingkan dengan skenario. Pertanyaan pertama tentang definisi netralitas, mayoritas responden (68%) menjawab "objektif dalam memberikan informasi", sementara jauh lebih sedikit yang memilih "tidak memihak pada suatu masalah"

(12%) atau “tidak mengutarakan pendapat” (5%). Namun, membandingkan definisi netralitas ini dengan skenario mana yang dipilih responden sebagai penggambaran sikap netral mengungkapkan beberapa variabilitas. Misalnya, responden “sangat setuju” bahwa tidak mengutarakan pendapat ketika seorang patron mengomentari seorang tokoh politik, menunjukkan sikap netral, yang tampaknya bertentangan dengan tanggapan rendah yang mengidentifikasi tidak memihak dan tidak mengungkapkan pendapat sebagai definisi netralitas. Hasil pengamatan peneliti mengungkapkan bahwa sikap ini tidak diterapkan secara konsisten di seluruh skenario.

- Sebagian besar responden percaya bahwa pustakawan tidak boleh memberikan pendapat tentang tokoh politik, lebih sedikit yang setuju bahwa pustakawan perlu menjaga keseimbangan antara ide Konservatif dan Liberal dalam koleksi. Pustakawan juga mungkin bekerja di bawah definisi netralitas yang berbeda dalam keadaan yang berbeda pula. Misalnya, fakta bahwa mayoritas pustakawan memilih "tidak mengomentari tokoh politik" dan "tidak menawarkan pendapat tentang tokoh politik ketika ditanya" sebagai demonstrasi netralitas menyiratkan adanya hubungan yang dirasakan antara netralitas atau tampil apolitis dalam pekerjaan mereka. Skenario berikutnya yang paling sering dipilih adalah membeli buku-buku Konservatif saat membeli buku-buku Demokrat, yang tampaknya semakin meningkatkan hubungan antara politik dan netralitas. Dengan kata lain, dalam beberapa situasi, pustakawan mungkin memandang netralitas sebagai non-partisan.
- Skenario yang tersisa menambahkan lapisan yang berbeda ke definisi netralitas, mengungkapkan kompleksitas lebih lanjut. Gerakan seperti Black Lives Matter telah membantu meningkatkan kesadaran tentang masalah keadilan sosial seperti kebrutalan polisi dan supremasi kulit putih, dan skenario pada pajangan buku dan *meeting-room* dimaksudkan untuk menyelidiki pertanyaan ini. Sama seperti Hautpman (1976) berspekulasi bahwa serentetan ketakutan bom dan kematian terkait bom dapat memengaruhi kesediaan pustakawan menyediakan referensi untuk menjawab pertanyaan tentang pembuatan bom, para peneliti bertanya-tanya apakah perhatian yang meningkat di sekitar masalah ini dapat memengaruhi pandangan pustakawan tentang netralitas ketika lebih eksplisit terkait dengan pertanyaan tentang keadilan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa responden merasa lebih yakin bahwa

netralitas berkaitan dengan keberpihakan politik, tetapi tidak terlalu berkaitan akan peran netralitas terkait isu-isu seputar keadilan sosial.

- Netralitas menghalangi pustakawan untuk mengambil sikap terhadap masalah sosial yang pada akhirnya dapat memperkuat status quo. Dalam temuan ini, peneliti menyimpulkan pustakawan mendefinisikan netralitas secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Dengan kata lain, pustakawan mengkonseptualisasikan netralitas sebagai “tidak memihak” ketika menerapkannya pada masalah keadilan sosial dan “bersikap objektif” ketika berbicara politik.
- Hasil survei menunjukkan bahwa, lebih sedikit orang yang memilih skenario perubahan iklim sebagai menunjukkan sikap netral (8%) daripada mereka yang berkaitan dengan keadilan sosial dan politik, dengan banyak yang mengatakan di bagian survei terbuka (teks) bahwa perubahan iklim adalah sains dan tidak bisa diperdebatkan. Sebesar 92% pustakawan yang tidak melihat skenario ini menunjukkan netralitas akan setuju dengan sentimen ini. Peneliti beranggapan bahwa hasil ini menjadi masuk akal jika sebagian besar responden mendefinisikan netralitas sebagai "bersikap objektif". Jika pustakawan mendefinisikan objektivitas seperti yang dikatakan Knowles (2018), “mempertimbangkan atau merepresentasikan fakta, dan informasi lain tanpa dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi,” atau seperti yang dikatakan Litwin (2006: 9), sebagai "apa pun yang dapat diverifikasi benar terlepas dari apa yang mungkin dipercayai," maka pustakawan publik melihat membela kebenaran ilmiah perubahan iklim sebagai sesuatu yang mereka tidak perlu netral. Namun, jika sikap netralitas merupakan bagian dari kebebasan intelektual, sebagaimana dikemukakan dalam literatur, maka gagasan bahwa pustakawan harus netral tentang beberapa hal dan bukan yang lain (dalam hal ini masalah ilmiah atau terhadap masalah keadilan sosial) bertentangan dengan definisi kebebasan intelektual dari ALA *Intellectual Freedom Manual*, yang adalah “hak setiap individu untuk mencari dan menerima informasi dari semua sudut pandang tanpa batasan” (Magi dan Garner, 2015: 3). Sikap seperti itu, yang diungkapkan sepenuhnya, akan menunjukkan bahwa para penyangkal perubahan iklim, yang mewakili 29% orang Amerika, dengan 44% orang Amerika yang tidak percaya bahwa perubahan iklim adalah buatan manusia (Ballew et al., 2019), memiliki hak untuk mengakses informasi yang mendukung sudut pandang mereka, terlepas dari apakah pustakawan individu setuju dengan materi, atau bahkan apakah bukti ilmiah yang lebih banyak mendukungnya.

- Demikian pula, 72% partisipan dalam penelitian ini juga tidak merasakan skenario “mengizinkan kelompok supremasi kulit putih untuk bertemu di perpustakaan” adalah sikap netral, padahal dalam ALA Intellectual Freedom Manual menyatakan bahwa, perpustakaan menyediakan ruang rapat untuk umum, "pembatasan penggunaannya harus netral dari sudut pandang dan konten netral dan hanya berkaitan dengan waktu, tempat, dan cara penggunaan," menurut Amandemen Pertama (Magi dan Garner , 2015: 157).
- Perbedaan yang sama dijelaskan oleh Oltmann (2019) dalam penelitiannya, ketika 39,8% responden mengatakan bahwa keyakinan pribadi mereka terkadang bertentangan dengan pendirian ALA tentang kebebasan intelektual. Hal ini berlaku dalam penelitian Moody's (2004), dengan 28% responden mengatakan bahwa keyakinan pribadi mereka, pada titik tertentu, bertentangan dengan nilai-nilai profesional.
- Kesimpulannya, temuan studi ini berbicara tentang kesulitan dalam mengkonseptualisasikan netralitas dan perjuangan yang dihadapi para profesional informasi untuk memahami perannya dalam profesi mereka.

5. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa meskipun mayoritas pustakawan publik mendefinisikan netralitas sebagai “bersikap objektif dalam memberikan informasi” secara abstrak, dalam konteks, konseptualisasi mereka tentang netralitas lebih bernuansa. Serta, konseptualisasi terhadap netralitas juga berbeda-beda tergantung oleh situasi. Meskipun sebagian besar pustakawan percaya bahwa mereka tidak boleh memihak atau mengutarakan pendapat terkait tokoh politik, mereka lebih nyaman mengambil posisi dalam masalah ilmiah seperti perubahan iklim, atau masalah sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mungkin kata "netralitas" itu sendiri bermasalah, karena tidak digunakan secara konsisten. Ketidak konsistenan ini, menunjukkan bahwa beberapa perdebatan di lapangan disebabkan oleh kurangnya ketepatan dalam terminologi daripada dari perbedaan ideologis yang sebenarnya. Di antara masalah yang didiskusikan penulis adalah memperjuangkan keseimbangan perspektif dalam koleksi dan pajangan; menjaga objektivitas dalam penyediaan fakta dan evaluasi informasi; non-keberpihakan dalam memberikan pendapat tentang tokoh politik; dan memihak pada masalah keadilan sosial. Para

responden dalam survei ini juga lebih mementingkan mengomentari politisi individu, daripada mendukung isu sosial tertentu.

Temuan survei ini menunjukkan beberapa pustakawan nyaman dengan gagasan "bersikap netral" dalam pembangunan koleksi dengan arti mencoba memastikan berbagai sudut pandang dalam pengembangan koleksi. Perbedaannya sudut pandang di sini adalah salah satu bentuk kebebasan intelektual dengan memberikan akses sebebaskan mungkin dan sambil tetap menerapkan penilaian profesional saat membantu orang dalam mengevaluasi dan menggunakan informasi. Sebagian besar pustakawan tidak mendefinisikan netralitas sebagai keberpihakan.

Scott dan Saunders dalam penelitian ini berpendapat, bahwa kebingungan tentang topik netralitas berasal dari kurangnya panduan dari ALA. Dalam memperdebatkan kenetralan, para profesional sering membingkai "netralitas" sebagai salah satu nilai inti pustakawan, tetapi, seperti disebutkan di atas, kata "netralitas" sebagian besar tidak ada dalam literatur ALA. Netralitas yang dibicarakan seringkali berbaur dengan kebebasan intelektual, seperti yang tersurat dalam Program Kepresidenan 2018 dan tersirat dalam Manual Kebebasan Intelektual. ALA harus membedakan istilah-istilah ini dan menguraikan pendiriannya tentang netralitas perpustakaan. ALA harus membahas perbedaan antara kepercayaan profesional dan pribadi lebih sering dan lebih terbuka. Serta, harus dijelaskan tentang bagaimana pustakawan dapat menanggapi masalah sosial dengan cara yang tetap menjaga kebebasan intelektual.

6. Kelebihan

- Penulis menyarankan studi lanjutan, mengingat kurangnya penelitian tentang netralitas perpustakaan khususnya dalam mendefinisikan netralitas perpustakaan dan netralitas yang berkaitan dengan masalah kebijakan ruang pertemuan, komunitas, katalogisasi, dan misi perpustakaan umum secara keseluruhan.
- Penulis memberi saran untuk studi lanjutan, penelitian tentang evolusi konsep "netralitas" dan kebebasan intelektual. Kaitan antara netralitas dan politik atau keberpihakan yang muncul dari temuan tersebut dapat digali lebih dalam. Mempertimbangkan untuk bertanya pada responden untuk mengidentifikasi di mana mereka berada pada spektrum politik konservatif, moderat, dan liberal, atau apa afiliasi partainya untuk melihat apakah ideologi ini berkorelasi dengan sikap mereka terhadap netralitas.

- Banyak literatur yang memperdebatkan posisi tentang netralitas dari sudut pandang filosofis, sementara penelitian ini dimaksudkan penulis untuk mengisi kesenjangan dengan meneliti bagaimana pustakawan mendefinisikan netralitas itu sendiri dan mempertimbangkan sikap netral mereka dalam praktik sehari-hari.
- Hasil penelitian ini dapat membantu untuk memfokuskan perdebatan yang sedang berlangsung tentang netralitas di seluruh profesi, dan akan berguna secara khusus bagi pustakawan publik dan direktur perpustakaan umum yang bergulat dengan masalah netralitas.

7. Kekurangan

- Survei penelitian ini didistribusikan melalui listservs dan meskipun jumlah tanggapannya substansial, penelitian ini tidak menggunakan sampel acak, sehingga perlu kehati-hatian dalam menggeneralisasi. Ada kemungkinan bahwa survei ini mengalami bias responden. Karena motivasi orang yang menanggapi survei ini mungkin berbeda dengan mereka yang memilih untuk tidak menanggapi. Misalnya, orang-orang dengan pendapat yang kuat tentang netralitas, atau mereka yang sudah sering memikirkan tentang netralitas, akan lebih cenderung untuk menanggapi daripada mereka yang tidak tertarik dengan topik tersebut, dan perbedaan tersebut mungkin akan mengubah hasil.
- Peneliti mengakui bahwa ada satu pertanyaan yang salah kata. Pertanyaan ini menanyakan “apakah ketika membeli buku tentang cita-cita Demokrat, pustakawan juga harus membeli buku tentang cita-cita Konservatif.” Penjajaran Demokrat dan Konservatif di sini salah. Pertanyaan tersebut seharusnya menggunakan kata "Liberal" sebagai pengganti "Demokratis", dan para peneliti mengakui bahwa kata-kata tersebut secara potensial mungkin telah mengubah hasil untuk skenario pertanyaan tersebut.

REFERENSI

Scott, Dani., and Saunders, Laura. (2020). Neutrality in public libraries: How Are We Defining One of Our Core Values?. *Journal of Librarianship and Information Science*, 1-14.